



PERWAKILAN
BPKP PROVINSI

KALSEL



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022 [AUDITED]

HADIR
BERMANFAAT

**LAPORAN KEUANGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN**

2022

AUDITED

Nomor :KU.02/LPP-15.a/PW16/1/2023

Tanggal: 28 Februari 2023



**PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, 28 Februari 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

KATA PENGANTAR *halaman i*

DAFTAR ISI *halaman ii*

DAFTAR TABEL *halaman iv*

DAFTAR LAMPIRAN *halaman v*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB *halaman vii*

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN *halaman 1*

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN *halaman 4*

II. NERACA *halaman 5*

III. LAPORAN OPERASIONAL *halaman 7*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS *halaman 9*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *halaman 7*

 A. Penjelasan Umum *halaman 7*

 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis *halaman 10*

 A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan *halaman 11*

 A.3. Basis Akuntansi *halaman 12*

 A.4. Dasar Pengukuran *halaman 13*

 A.5. Kebijakan Akuntansi *halaman 13*

 A.6. Capaian Output Strategis *halaman 23*

 B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran *halaman 25*

 B.1. Pendapatan Negara dan Hibah *halaman 26*

 B.2. Belanja Negara *halaman 27*

 C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca *halaman 34*

 C.1. Aset Lancar *halaman 34*

 C.2. Aset Tetap *halaman 35*

 C.3. Aset Lainnya *halaman 41*

- C.4. Kewajiban Jangka Pendek *halaman 43*
- C.5. Ekuitas *halaman 45*
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional *halaman 46*
 - D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional *halaman 46*
 - D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional *halaman 55*
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas *halaman 57*
 - E.1. Ekuitas Awal *halaman 57*
 - E.2. Surplus/(Defisit) LO *halaman 57*
 - E.3. Transaksi Antar Entitas *halaman 57*
 - E.4. Ekuitas Akhir *halaman 59*
- F. Pengungkapan Penting Lainnya *halaman 60*
 - F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan *halaman 60*
 - F.2. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 *halaman 61*



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 27</i>
Tabel 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2022 <i>halaman 27</i>
Tabel 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2022 <i>halaman 28</i>
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 28</i>
Tabel 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 <i>halaman 29</i>
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 30</i>
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 <i>halaman 30</i>
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 31</i>
Tabel 9	Belanja Penanganan Pandemi <i>COVID-19</i> <i>halaman 32</i>
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 32</i>
Tabel 11	Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 34</i>
Tabel 12	Rincian Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 35</i>
Tabel 13	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 <i>halaman 40</i>
Tabel 14	Rincian Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 42</i>
Tabel 15	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 43</i>
Tabel 16	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 44</i>
Tabel 17	Rincian Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dan per 2021 <i>halaman 45</i>
Tabel 18	Rincian PNBP Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 46</i>
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2022 Menurut LO dan LRA <i>halaman 47</i>
Tabel 20	Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 47</i>
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 3</i>

Tabel 22	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2022 Menurut LO dan LRA <i>halaman 49</i>
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 49</i>
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 50</i>
Tabel 25	Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Menurut LO dan LRA <i>halaman 51</i>
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 52</i>
Tabel 27	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 53</i>
Tabel 28	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 54</i>
Tabel 29	Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 <i>halaman 54</i>
Tabel 30	Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional <i>halaman 55</i>
Tabel 31	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 <i>halaman 56</i>

1. LAPORAN KEUANGAN APLIKASI SAKTI TAHUN 2022
2. LAPORAN ASET APLIKASI SAKTI TAHUN 2022
3. LAPORAN PERSEDIAAN APLIKASI SAKTI TAHUN 2022
4. BA LPJ BENDAHARA TAHUN 2022
5. BA TRANSFER MASUK



PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 28 Februari 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.756.408,00 atau mencapai 316,83 persen dari target estimasi sebesar Rp16.020.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.137.319.126,00 atau mencapai 98,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.469.194.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp98.981.403.686,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp135.416.179,00, Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp98.839.254.382,00, dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp6.733.125,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp52.742.874,00 dan Rp98.928.660.812,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.185.000,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24.178.893.981,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp24.147.708.981,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp408,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp24.147.708.573,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp98.982.006.667,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp24.147.708.573,00, ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24.094.362.718,00. Sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp98.928.660.812,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022			31 DES 2021
	ANGGARAN	REALISASI	%	[REALISASI]
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH [B.1]				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.020.000,00	50.756.408,00	316,83	53.810.851,00
Jumlah Pendapatan	16.020.000,00	50.756.408,00	316,83	53.810.851,00
B BELANJA [B.2]				
Belanja Pegawai [B.2.1]	15.906.450.000,00	15.598.760.664,00	98,06	16.929.017.844,00
Belanja Barang [B.2.2]	7.597.244.000,00	7.574.605.162,00	99,70	6.204.344.151,00
Belanja Modal [B.2.3]	965.500.000,00	963.953.300,00	99,83	1.130.157.400,00
Jumlah Belanja	24.469.194.000,00	24.137.319.126,00	98,64	24.263.519.395,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

II. NERACA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	31 DES 2022	31 DES 2021
ASET		
ASET LANCAR [C.1]		
Persediaan [C.1.1]	135.416.179,00	130.587.169,00
JUMLAH ASET LANCAR	135.416.179,00	130.587.169,00
ASET TETAP [C.2]		
Tanah [C.2.1]	85.760.110.000,00	85.760.110.000,00
Peralatan dan Mesin [C.2.2]	7.191.732.212,00	6.763.052.912,00
Gedung dan Bangunan [C.2.3]	13.354.982.000,00	12.809.958.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan [C.2.4]	133.297.960,00	133.297.960,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan [C.2.5]	110.812.913,00	110.812.913,00
Akumulasi Penyusutan [C.2.6]	(7.711.680.703,00)	(6.696.016.735,00)
JUMLAH ASET TETAP	98.839.254.382,00	98.881.215.050,00
ASET LAINNYA [C.3]		
Aset Tak Berwujud [C.3.1]	82.605.440,00	82.605.440,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya [C.3.2]	(75.872.315,00)	(63.300.705,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.733.125,00	19.304.735,00
JUMLAH ASET	98.981.403.686,00	99.031.106.954,00

NAMA PERKIRAAN	31 DES 2022	31 DES 2021
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK [C.4]		
Utang Kepada Pihak Ketiga [C.4.1.]	33.171.874,00	49.100.287,00
Pendapatan Diterima Dimuka [C.4.12]	19.571.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	52.742.874,00	49.100.287,00
EKUITAS [C.5]		
Ekuitas [C.5.1]	98.928.660.812,00	98.982.006.667,00
JUMLAH EKUITAS	98.928.660.812,00	98.982.006.667,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	98.981.403.686,00	99.031.106.954,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

III. LAPORAN OPERASIONAL

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	31 DES 2022	31 DES 2021
KEGIATAN OPERASIONAL [D.1]		
PENDAPATAN OPERASIONAL [D.1.1]		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	31.185.000,00	29.099.560,00
Jumlah Pendapatan Operasional	31.185.000,00	29.099.560,00
BEBAN OPERASIONAL [D.1.2]		
Beban Pegawai [D.1.2.1]	15,578,327,088,00	16,930,837,480,00
Beban Persediaan [D.1.2.2]	75,287,631,00	273,411,707,00
Beban Barang dan Jasa [D.1.2.3]	1,999,892,965,00	1,720,415,838,00
Beban Pemeliharaan [D.1.2.4]	925,160,339,00	829,697,364,00
Beban Perjalanan Dinas [D.1.2.5]	4,573,940,380,00	3,430,228,731,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi [D.1.2.6]	1,026,285,578,00	996,435,548,00
Jumlah Beban Operasional	24,178,893,981,00	24,181,026,668,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(24,147,708,981,00)	(24,151,927,108,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL [D.2]		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR [D.2.1]		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar [D.2.1.1]	0,00	40.111.111,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar [D.2.1.2]	0,00	0,00

NAMA PERKIRAAN	31 DES 2022	31 DES 2021
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	40.111.111,00
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA [D.2.2]		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya [D.2.2.1]	408,00	180,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya [D.2.2.2]	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)	408,00	180,00
Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	408,00	40.111.291,00
SURPLUS/(DEFISIT) – LO (D.1+D.2)	(24,147,708,573,00)	(24,111,815,817,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	31 DES 2022	31 DES 2021
EKUITAS AWAL [E.1]	98.982.006.667,00	98.722.218.652,00
SURPLUS/(DEFISIT) – LO [E.2]	(24,147,708,573,00)	(24,111,815,817,00)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0,00	(30.972.375,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS [E.3]		
Ditagihkan ke Entitas Lain [E.3.1]	24,137,319,126,00	24,263,519,395,00
Diterima dari Entitas Lain [E.3.2]	(50,756,408,00)	(53,810,851,00)
Transfer Masuk [E.3.3]	7.800.000,00	192,867,663,00
Transfer Keluar [E.3.4]	0,00	0,00
Jumlah Transaksi Antar Entitas	24,094,362,718,00	24,402,576,207,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3)	(53,345,855,00)	259,788,015,00
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	98,928,660,812,00	98,982,006,667,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

A

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA
Kepala Perwakilan	Rudy M Harahap
Kepala Bagian Umum	Bambang Yuliyanto
Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	Abror Umar
Koordinator Pengawasan Bidang APD	Anom Bajiat Suta
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Puguh
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	Muhammad Riyanto
Koordinator Pengawasan Bidang P3A	Sukari
Sub Koordinator SDM	Noor Idahliana
Sub Koordinator Keuangan	Temmy Pratama
Sub Koor Kearsipan, Aset dan Rumah Tangga	Ucu Rahmat

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A.3 Basis Akuntansi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan

basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - ✓ Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	TARIF PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	TARIF PENYISIHAN
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	a) Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan b) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
 - Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
- b. Aset Tetap
- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
 - Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang

adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
 - TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Aset Lainnya
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- o Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6 Capaian Output Strategis

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan sedangkan output strategis adalah output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai Rencana Kerja Pemerintah dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Capaian Output Strategis BPKP selaku badan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai auditor internal pemerintah adalah Sintesa Hasil Pengawasan (SHP).

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah selama Tahun Anggaran 2022 yang telah dicapai adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	PERSENTASE PENYERAPAN	TARGET KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	PROGRES CAPAIAN OUTPUT
Kode Output : 3676.EBA					
19.156.900.000	18.864.987.197	98,54	1	1	100
Kode Output : 3676.EBB					
965.500.000	963.953.300	99,84	15	15	100
20.122.400.000	19.828.940.497	98,54	16	16	100

2. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	PERSENTASE PENYERAPAN	TARGET KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	PROGRES CAPAIAN OUTPUT
Kode Output : 3701.FAG					
2.853.783.000	2.849.129.420	99,84	51	51	100
Kode Output : 3701.UAG					
2.017.734.000	1.193.954.734	59,17	22	22	100
4.346.794.000	4.340.860.025	99,86	73	73	100

PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B

Pagu Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 semula sebesar Rp23.724.537.000,00 dan telah dilakukan lima kali revisi sehingga pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir Tahun 2022 menjadi Rp24.469.194.000,00.

Rincian Pagu/Revisi sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL ANGGARAN
Anggaran Semula	18.733.437.000,00	4.991.100.000,00	0,00	23.724.537.000,00
Pagu/Revisi Bulan Maret	18.733.437.000,00	5.822.934.000,00	0,00	24.556.371.000,00
Pagu/Revisi Bulan Agustus	18.733.437.000,00	8.262.592.000,00	0,00	26.996.029.000,00
Pagu/Revisi Bulan Agustus	16.977.712.000,00	8.214.842.000,00	0,00	25.192.554.000,00
Pagu/Revisi Bulan Oktober	15.906.450.000,00	8.214.842.000,00	965.500.000,00	25.086.792.000,00
Sampai Dengan Akhir Desember 2022	15.906.450.000,00	7.597.244.000,00	965.500.000,00	24.469.194.000,00

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja menurut Program Perwakilan BPKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA	MENJADI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP (01.01.WA.3676)	21.983.887.000,00	20.122.400.000,00
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (01.01.CH.3701)	1.740.650.000,00	4.346.794.000,00
Total	23.724.537.000,00	24.469.194.000,00

Jika dibandingkan anggaran semula dan setelah revisi terakhir adalah sebagai berikut:

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL ANGGARAN
Anggaran Semula	18.733.437.000,00	4.991.100.000,00	0,00	23.724.537.000,00
Revisi Terakhir	15.906.450.000,00	7.597.244.000,00	965.500.000,00	24.469.194.000,00
Penambahan/ Pengurangan	(2.826.987.000,00)	2.606.144.000,00	965.500.000,00	744.657.000,00

Penambahan/pengurangan Pagu Belanja Barang sebesar 744.657.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN SEMULA	SETELAH REVISI	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
3701.FAG	453.050.000,00	2.853.783.000,00	2.400.733.000,00
3701.UAG	1.287.600.000,00	1.493.011.000,00	205.411.000,00
3676.EBA	21.983.887.000,00	19.156.900.000,00	(2.826.987.000,00)
3676.EBB	0,00	965.500.000,00	965.500.000,00
Jumlah Penambahan / Pengurangan			744.657.000,00

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.756.408,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP

*Pendapatan Negara & Hibah
Rp50.756.408,00*

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.054.443,00 atau 5,68 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun 2021 sebesar Rp53.810.851,00 disebabkan tidak adanya penjualan Peralatan dan Mesin.

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBPN
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	40.111.111,00	(40.111.111,00)	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.756.000,00	13.699.000,00	37.057.000,00	270,51
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	408,00	180,00	228,00	126,67
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	560,00	(560,00)	(100,00)
Total	50.756.408,00	53.810.851,00	(3.054.443,00)	(5,68)

B.2 Belanja Negara

Realisasi belanja Tahun 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp24.137.319.126,00 atau 98,78 persen dari

*Belanja Negara
Rp24.137.319.126,00*

anggaran sebesar Rp24.469.194.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Program Tahun 2022

KODE PROG.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP (3676)	20.122.400.000,00	19.801.547.101,00	98,54
CH	Program Pengawasan Pembangunan (3701)	4.346.794.000,00	4.335.772.025,00	99,86

KODE PROG.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	Jumlah	24.469.194.000,00	24.137.319.126,00	98,78

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Tahun 2022

KJB	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
51	Belanja Pegawai	15.906.450.000,00	15.598.760.664,00	98,23
52	Belanja Barang	7.597,244,000,00	7,574,605,162,00	99,78
53	Belanja Modal	965.500.000,00	963.953.300,00	99,84
	Jumlah	24.469.194.000,00	24.137.319.126,00	98,78

Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp126.200.407,00 atau 0,52% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2021. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2022 dan 2021

JENIS BELANJA	REALISASI NETTO (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
51 Belanja Pegawai	15.598.760.664,00	16.929.017.844,00	(1.330.257.180,00)	(7,86)
52 Belanja Barang	7.574.605.162,00	6.204.344.151,00	1.370.261.011,00	22,09
53 Belanja Modal	963.953.300,00	1.130.157.400,00	(166.204.238,00)	(14,71)
Total	24.137.319.126,00	24.263.519.395,00	(126.200.407,00)	(0,52)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp15.598.760.664,00 dan Rp16.929.017.844,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Belanja Pegawai
15.598.760.664,00

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.149.894.000,00	7.102.301.226,00	99,33
Belanja Lembur	270.192.000,00	260.050.000,00	96,25
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.486.364.000,00	8.236.409.438,00	97,05
Jumlah	15.906.450.000,00	15.598.760.664,00	98,07

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp15.598.760.664,00 berasal dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp15.625.094.060,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp26.333.396,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.330.257.180,00 atau 7,86 persen disebabkan adanya mutasi Pejabat Fungsional Auditor (PFA), sedangkan yang masuk ke Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan lebih banyak CPNS.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI NETTO (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.102.301.226,00	8.064.203.962,00	(961.902.736,00)	(11,93)
Belanja Lembur	260.050.000,00	456.288.000,00	(196.238.000,00)	(43,01)
Belanja Tunjangan Khusus dan Transito	8.236.409.438,00	8.408.525.882,00	(172.116.444,00)	(2,05)
Total	15.598.760.664,00	16.929.017.844,00	(1.330.257.180,00)	(7,86)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar

Belanja Barang
7.574.605.162,00

Rp7.574.605.162,00 dan Rp6.204.344.151,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Barang Operasional	1.358.765.000,00	1.354.841.825,00	99,70
Belanja Barang Non Operasional	242.396.000,00	240.819.042,00	99,35
Belanja Barang Persediaan	80.495.000,00	80.116.641,00	99,53
Belanja Jasa	400.232.000,00	399.726.935,00	99,87
Belanja Pemeliharaan	927.801.000,00	925.160.339,00	99,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.587.555.000,00	4.573.940.380,00	99,70
Jumlah	7.597.244.000,00	7.574.605.162,00	99,70

Realisasi belanja barang (netto) sebesar Rp7.574.605.162,00 berasal dari belanja barang (bruto) sebesar Rp7.580.753.162,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp6.148.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.370.261.011,00 atau 22,09 persen disebabkan adanya belanja keperluan perkantoran dan pemeliharaan. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI NETTO (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Belanja Barang Operasional	1.354.841.825,00	1.232.262.766,00	122.579.059,00	9,95
Belanja Barang Non Operasional	240.819.042,00	78.025.786,00	162.793.256,00	208,64
Belanja Barang Persediaan	80.116.641,00	225.046.510,00	(144.929.869,00)	(64,40)
Belanja Jasa	399.726.935,00	409.082.994,00	(9.356.059,00)	(2,29)
Belanja Pemeliharaan	925.160.339,00	829.697.364,00	95.462.975,00	11,51
Belanja Perjalanan DN	4.573.940.380,00	3.430.228.731,00	1.143.711.649,00	33,34
Total	7.574.605.162,00	6.204.344.151,00	1.370.261.011,00	22,09%

B.2.2.1 Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi

Penanganan COVID-19
250.803.523,00

COVID-19 sebesar Rp250.807.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp250.803.523,00 dengan rincian yang tersaji pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9
Belanja Penanganan Pandemi COVID-19
Tahun 2022

NO	AKUN	ALOKASI ANGGARAN/DIPA (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1.	521131	6.670.000,00	6.667.682,00	99,97
2.	522192	24.398.000,00	24.397.500,00	99,99
3.	524115	219.739.000,00	219.738.341,00	99,99
Total		250.807.000,00	250.803.523,00	99,99

Tidak terdapat belanja terkait penanganan COVID-19 yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19.

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar

Belanja Modal
963.953.300,00

Rp963.953.300,00 dan Rp1.130.157.400,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.000,000	418.929.300,00	99,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545.500.000,00	545.024.000,00	99,91
Jumlah	965.500.000,00	963.953.300,00	99,84

Penurunan realisasi belanja modal tersebut dikarenakan alokasi anggaran belanja modal tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021. Perbandingan

realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI NETTO (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Peralatan dan Mesin	418.929.300,00	407.434.400,00	11.494.900,00	2,82
Gedung dan Bangunan	545.024.000,00	524.223.000,00	20.801.000,00	3,97
Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	198.500.000,00	(198.500.000,00)	(100,00)
Total	963.953.300,00	1.130.157.400,00	(166.204.100,00)	(14,71)

Terdapat Transaksi penambahan nilai gedung dan bangunan berupa realisasi belanja modal sebesar Rp545.024.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOL	NILAI (RP)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	348.071.000,00
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	196.953.000,00
Total		545.024.000,00

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp135.416.179,00 dan Rp130.587.169,00. Aset Lancar merupakan aset yang

Aset Lancar
Rp135.416.179,00

diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar tersebut baik untuk tahun 2022 dan tahun 2021 seluruhnya merupakan persediaan.

C.1.1 Persediaan

Persediaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp135.416.179,00 dan Rp130.587.169,00. Persediaan merupakan

Persediaan
Rp135.416.179,00

jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11
Rincian Persediaan
Tahun 2022 dan 2021

JENIS PERSEDIAAN	2022 (RP)	2021 (RP)
Barang Konsumsi	135.416.179,00	130.587.169,00
Jumlah	135.416.179,00	130.587.169,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp98.839.254.382,00 dan Rp98.881.215.050,00, yang merupakan aset

Aset Tetap
Rp98.839.254.382,00

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12
Rincian Aset Tetap
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
1 Tanah	85.760.110.000,00	85.760.110.000,00
2 Peralatan dan Mesin	7.191.732.212,00	6.763.052.912,00
3 Gedung dan Bangunan	13.354.982.000,00	12.809.958.000,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.297.960,00	133.297.960,00
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	110.812.913,00	110.812.913,00
Nilai Perolehan	106.550.935.085,00	105.577.231.785,00
6 Akumulasi Penyusutan	(7.711.680.703,00)	(6.696.016.735,00)
Nilai Buku	98.839.254.382,00	98.881.215.050,00

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah

Tanah
85.760.110.000,00

sebesar Rp85.760.110.000,00 dan Rp85.760.110.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada saldo tanah untuk tahun 2022.

URAIAN	JUMLAH (RP)
Nilai Perolehan Tahun 2021	85.760.110.000,00
Mutasi Tambah: -	0,00
Mutasi Kurang: -	0,00
Nilai Buku Tahun 2022	85.760.110.000,00

Tidak terdapat Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Tanah sampai dengan 2022.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp7.191.732.212,00 dan Rp6.763.052.912,00.

Peralatan dan Mesin

7.191.732.212,00

912,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp5.681.682.108,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp1.510.050.104,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH (RP)
Nilai Perolehan Tahun 2021	6.763.052.912,00
Mutasi Tambah:	
Realisasi Belanja Modal	418.929.300,00
Mutasi masuk	9.750.000,00
Mutasi Kurang : -	0,00
Nilai Perolehan Tahun 2022	7.191.732.212,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 2022	(5.681.682.108,00)
Nilai Buku Tahun 2022	1.510.050.104,00

Penambahan nilai Peralatan dan Mesin berasal dari realisasi belanja modal selama Tahun 2022 dan Transfer Masuk senilai Rp428.679.300,00. Realisasi belanja modal adalah berupa pembelian peralatan kantor dan kendaraan dinas operasional sedangkan mutasi masuk adalah penerimaan aset berupa Proyektor Infocus dari Biro Umum BPKP dengan nomor BAST PL.04/BAST-22/SU05/3/2022. Rincian penambahan peralatan mesin adalah sebagai berikut.

URAIAN	VOL	NILAI (RP)
1 Pompa Air	3	11.831.400,00
2 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	310.000.000,00
3 Sepeda Motor	1	32.240.000,00
4 Gergaji Chain Saw	1	2.636.100,00
5 CCTV - Camera Control Television System	3	35.964.000,00
6 Meja Makan Kayu	1	10.947.300,00
7 Mimbar/Podium	1	6.452.500,00
8 Lensa Kamera	1	8.858.000,00
9 LCD Projector/Infocus	1	9.750.000,00
Total		428.679.300,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp13.354.982.000,00 dan Rp12.809.958.000,

*Gedung dan Bangunan
13.354.982.000,00*

00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp1.972.537.899,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp11.382.444.101,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (RP)
Nilai Perolehan Tahun 2021	12.809.958.000,00
Mutasi Tambah:	0,00
Realisasi Belanja Modal	545.024.000,00
Mutasi Kurang: -	0,00
Nilai Perolehan Tahun 2022	13.354.982.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 2022	(1.972.537.899,00)
Nilai Buku Tahun 2022	11.382.444.101,00

Terdapat Transaksi penambahan nilai gedung dan bangunan berupa realisasi belanja modal sebesar Rp545.024.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	VOL	NILAI (RP)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	348.071.000,00
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	196.953.000,00
Total		545.024.000,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp133.297.960,00 dan Rp133.297.960,00.

*Jalan, Irigasi & Jaringan
133.297.960,00*

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 adalah sebesar Rp57.460.696,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp75.837.264,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (RP)
Nilai Perolehan Tahun 2021	133.297.960,00
Mutasi Tambah: -	0,00
Mutasi Kurang: -	0,00
Nilai Perolehan Tahun 2022	133.297.960,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 2022	(57.460.696,00)
Nilai Buku Tahun 2022	75.837.264,00

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.

C.2.5 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp110.812.913,00 dan Rp110.812.913

KDP
Rp110.812.913,00

,00. Mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH (RP)
Nilai Perolehan Tahun 2021	110.812.913,00
Mutasi Tambah: -	0,00
Mutasi Kurang: -	0,00
Nilai buku Tahun 2022	110.812.913,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp110.812.913,00 merupakan rencana pembangunan rumah dinas pegawai BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan realisasi pembayaran kontrak perencanaan sebesar Rp95.166.142,00 dan pengelolaan kegiatan sebesar Rp15.646.771,00. Sesuai dengan Kontrak Perencanaan Nomor PRJ-4/PW16/PPK/2020 tanggal 3 Maret 2020. Progres pekerjaan s.d 2020 berupa dokumen perencanaan sedangkan pekerjaan fisik belum dilaksanakan dan juga belum dilakukan lelang untuk pemilihan pelaksana pekerjaan. Dikarenakan adanya revisi pengurangan anggaran, maka pekerjaan fisik tersebut tidak bisa dilanjutkan pada TA 2020.

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp7.711.680.703,00 dan Rp6.696.016.

*Akm. Penyusutan AT
Rp110.812.913,00*

735,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2022

URAIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	AKUMULASI PENYUSUTAN (RP)	NILAI BUKU (RP)
Tanah	85.760.110.000,00	0,00	85.760.110.000,00
Peralatan dan Mesin	7.191.732.212,00	5.681.682.108,00	1.510.050.104,00
Gedung dan Bangunan	13.354.982.000,00	1.972.537.899,00	11.382.444.101,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.297.960,00	57.460.696,00	75.837.264,00

URAIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	AKUMULASI PENYUSUTAN (RP)	NILAI BUKU (RP)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	110.812.913,00	0,00	110.812.913,00
Total	106.550.935.085,00	7.711.680.703,00	98.839.254.382,00

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	JUMLAH
Saldo Akhir 2021 (A)	5.060.932.710,00	1.583.497.777,00	51.586.248,00	6.662.148.566,00
Saldo Akhir 2022 (B)	5.681.682.108,00	1.972.537.899,00	57.460.696,00	7.711.680.703,00
Mutasi (C = B - A)	620.749.398,00	389.040.122,00	5.874.448,00	1.015.663.968,00
Beban Penyusutan (D)	618.799.398,00	389.040.122,00	5.874.448,00	1.013.713.968,00
Selisih (C - D)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00

Terdapat selisih sebesar Rp1.950.000,00 antara mutasi penyusutan dengan beban penyusutan karena ada penyusutan dari Tranfer Masuk yang tidak menjadi beban penyusutan.

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.733.125,00 dan Rp19.304.735,00, merupakan aset yang tidak dapat

*Aset Tetap
Rp6.733.125,00*

dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14
Rincian Aset Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
1 Aset Tak Berwujud	82.605.440,00	82.605.440,00
2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(75.872.315,00)	(63.300.705,00)
Nilai Buku	6.733.125,00	19.304.735,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp82.605.440,00 dan Rp82.605.440,

*Aset Tak Berwujud
82.605.440,00*

00. Tidak terdapat mutasi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa Software dan lisensi.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp75.872.315,00 dan

*Akm. Peny. & Amr. AL
75.872.315,00*

Rp63.300.705,00. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	75.872.315,00	63.300.705,00
Total	75.872.315,00	63.300.705,00

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	JUMLAH
Saldo Akhir 2021 (A)	63.300.705,00	63.300.705,00
Saldo Akhir 2022 (B)	75.872.315,00	75.872.315,00
Mutasi (C = B - A)	12.571.610,00	12.571.610,00
Beban Penyusutan (D)	12.571.610,00	12.571.610,00
Selisih (D - C)	0,00	0,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp52.742.874,00 dan Rp49.100.287,00. Kewajiban

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp52.742.874,00*

Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
Utang Kepada Pihak Ketiga	33.171.874,00	49.100.287,00
Pendapatan Diterima Dimuka	19.751.000,00	0,00
Total	52.742.874,00	49.100.287,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp33.171.874,00 dan Rp49.100.287,00.

Utang kepada Pihak ke-3
33.171.874,00,00

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN		2022 (RP)	2021 (RP)
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	4.294.060,00	24.727.636,00
	<i>a. Gaji dan Tunjangan</i>	4.294.060,00	453.636,00
	<i>b. Uang Makan Pegawai</i>	-	24.274.000,00
	<i>c. Uang Lembur</i>	-	-
	<i>d. Tunjangan Kinerja</i>	-	-
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	28.877.814,00	24.372.651,00
	<i>a. Tagihan Listrik</i>	24.955.802	20.810.651
	<i>b. Tagihan Telepon</i>	1.450.512	-
	<i>c. Tagihan Air</i>	2.143.500	3.562.000
	<i>d. Tagihan Jasa Pos/Pengiriman Surat</i>	328.000	-
	<i>e. Tagihan Langgan Lainnya</i>	-	-
	<i>f. Tagihan Bea Siswa STAR</i>	-	-
	<i>g. Persediaan yang belum di-SP2D-kan</i>	-	-
Nilai Buku		33.171.874,00	49.100.287,00

C.4.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.571.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan

Akm. Peny. & Amr. AL
19.571.000,00

diterima dimuka Tahun 2022 merupakan pendapatan sewa atas bangunan ATM BRI yang sudah diterima kas negara namun belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Jangka waktu sewa tersebut adalah selama 2 tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan nilai sewa Rp39.142.000,00.

Rincian Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
Pendapatan sewa diterima dimuka	19.571.000,00	0,00
Nilai Buku	19.571.000,00	0,00

C.5 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing

Ekuitas
Rp98.928.660.812,00

adalah sebesar Rp98.928.660.812,00 dan Rp98.982.006.667,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.1 Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.147.708.573,00 dan Rp24.151.927.108,00.

*Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional
(Rp24.147.708.573,00)*

Jumlah Tahun 2022 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp31.185.000,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp24.178.893.981,00.

D.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp31.185.000,00 dan Rp29.099.560,00.

*Pendapatan Operasional
Rp31.185.000,00*

Realiasi pendapatan operasional Tahun 2022 seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terdapat kenaikan realisasi PNBP sebesar Rp2.085.440,00 atau 7,17 persen. Kenaikan PNBP tersebut dikarenakan adanya kenaikan nilai sewa bangunan berupa ATM BRI pada Tahun 2022 dibanding pada kontrak sebelumnya. Rincian PNBP 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.185.000,00	29.099.000,00	2.085.440,00	7,17
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	560,00	(560,00)	0,00
Total	31.185.000,00	29.099.560,00	2.085.440,000	7,17

Jika realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp19.571.408,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
Tahun 2022 menurut LO dan LRA

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH (RP)
	LO	LRA	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.185.000,00	50.756.000,00	(19.571.000,00)
Total	31.185.000,00	50.756.000,00	(19.571.000,00)

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp19.571.000,00 tersebut merupakan Pendapatan diterima sampai dengan Tahun 2022, namun masa pemanfaatan aset melewati 2022.

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.178.893.981,00 dan Rp24.181.026.668,

*Beban Operasional
Rp24.178.893.981,00*

00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Operasional
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Pegawai	15.578.327.088,00	16.930.837.480,00	(1.352.510.392,00)	(7,99%)
Beban Persediaan	75.287.631,00	273.411.707,00	(198.124.076,00)	(72,46%)
Beban Barang dan Jasa	1.999.892.965,00	1.720.415.838,00	279.477.127,00	16,24%

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Pemeliharaan	925.160.339,00	829.697.364,00	95.462.975,00	11,51%
Beban Perjalanan Dinas	4.573.940.380,00	3.430.228.731,00	1.143.711.649,00	33,34%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.026.285.578,00	996.435.548,00	29.850.030,00	3,00%
Total	24.178.893.981,00	24.181.026.668,00	(2.132.687,00)	(0,01%)

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.578.327.088,00 dan Rp16.930.837.480,00.

*Beban Pegawai
Rp15.578.327.088,00*

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 21 berikut ini.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Gaji & Tunjangan	7.081.867.650,00	8.066.023.598,00	(985.595.948,00)	(12,20)
Beban Lembur	260.050.000,00	456.288.000,00	(196.238.000,00)	(43,01)
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	8.236.409.438,00	8.408.525.882,00	(172.116.444,00)	(2,05)
Total	15.578.327.088,00	16.930.837.480,00	(1.352.510.392,00)	(7,99)

Jika realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp20.433.576,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
Tahun 2022 menurut LO dan LRA

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH (RP)
	LO	LRA	
Beban Gaji & Tunjangan	7.080.427.650,00	7.102.301.226,00	20.433.576,00
Beban Lembur	260.050.000,00	260.050.000,00	-
Beban Tunj. Khusus dan Beban Pegawai Transito	8.236.409.438,00	8.236.409.438,00	-
Total	15.578.327.088,00	15.598.760.664,00	20.433.576,00

Selisih tersebut adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2022 atas beban Tahun 2021.

D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp75.287.631,00 dan Rp273.411.707,00.

*Beban Persediaan
Rp75.287.631,00*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Penurunan Beban Persediaan disebabkan karena pada Tahun 2022, satker menerapkan *e-office* dalam administrasi sehingga penggunaan kertas dan tinta printer berkurang. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Persediaan
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.306.131,00	190.109.186,00	(134.803.055,00)	(70,91%)
Beban Persediaan Lainnya	19.981.500,00	83.302.521,00	(134.803.055,00)	(76,01%)
Total	75.287.631,00	273.411.707,00	(134.803.055,00)	(72,46%)

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp80.116.641,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp75.287.631,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2022.

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.999.892.965,00 dan Rp1.720.415.838,00.

*Beban Persediaan
Rp1.999.892.965,00*

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 24 berikut ini.

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Barang Operasional	1.355.169.825,00	1.228.216.766,00	126.953.059,00	10,34%
Beban Barang	240.819.042,00	78.025.786,00	162.793.256,00	208,64%

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Non Operasional				
Beban Jasa	403.904.098,00	414.173.286,00	(10.269.188,00)	(2,48%)
Total	1.999.892.965,00	1.720.415.838,00	279.477.127,00	16,24%

Jika realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.505.163,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2022 menurut LO dan LRA

URAIAN	REALISASI MENURUT		SELISIH (RP)
	LO	LRA	
Beban Barang Operasional	1.355.169.825,00	1.354.841.825,00	328.000,00
Beban Barang Non Operasional	240.819.042,00	240.819.042,00	0,00
Beban Jasa	403.904.098,00	399.726.935,00	4.177.163,00
Total	1.999.892.965,00	1.995.387.802,00	4.505.163,00

Selisih realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (RP)
BEBAN BARANG OPERASIONAL	328.000,00
Beban Pengiriman kepada PT. Pos Tahun 2022 yang akan dibayarkan pada Tahun 2023	328.000,00
BEBAN JASA	4.177.163,00

Selisih antara Pembayaran Beban Tagihan Listrik Tahun 2021 yang dibayarkan pada Awal Tahun 2022 dan Tagihan Beban Listrik Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023	Rp4.145.151,00
Selisih antara Pembayaran Tagihan Beban Telepon Tahun 2021 yang dibayarkan pada Awal Tahun 2022 dan Tagihan Beban Telepon Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023	Rp1.450.512,00
Selisih antara Pembayaran Tagihan Beban Air Tahun 2021 yang dibayarkan pada Awal Tahun 2022 dan Tagihan Beban Air Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023	(Rp1.418.500)
Total	4.505.163,00,00

Tidak terdapat selisih realisasi Beban Barang Non Operasional.

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp925.160.339,00 dan Rp829.697.364,00.

*Beban Pemeliharaan
Rp925.160.339,00*

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 26 berikut ini.

Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan

Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan	614.103.063,00	501.374.238,00	112.728.825,00	22,48
Beban Peralatan dan Mesin	311.057.276,00	328.323.126,00	(17.265.850,00)	(5,26)
Total	925.160.339,00	829.697.364,00	95.462.975,00	11,51

Tidak terdapat selisih antara realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.573.940.380,00 dan Rp3.430.228.731,00.

*Beban Perjadin
Rp4.573.940.380,00*

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan dilakukan Revisi Penambahan Pagu Anggaran Pengawasan Tahun 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 27 berikut ini.

Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.916.652.039,00	1.530.010.525,00	2.386.641.514,00	155,99

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	437.550.000,00	120.975.000,00	316.575.000,00	261,69
Beban Perjalanan Dinas Penanganan COVID-19	219.738.341,00	1.779.243.206,00	(1.559.504.865,00)	(87,65)
Total	4.573.940.380,00	3.430.228.731,00	1.143.711.649,00	33,34

Tidak terdapat selisih antara realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp 1.026.285.578,00 dan Rp996.435.548,00.

*Beban Penyutan & Amortisasi
Rp925.160.339,00*

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel 28
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	618.799.398,00	599.197.405,00	19.601.993,00	3,27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	389.040.122,00	372.058.960,00	16.981.162,00	4,56

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Beban Penyusutan Jalan, dan Jembatan	3.101.100,00	3.101.100,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.773.348,00	2.773.348,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	12.571.610,00	19.304.735,00	(6.733.125,000)	(34,88)
Total	1.026.285.578,00	996.435.548,00	29.850.030,00	3,00

D.1.2.7 Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada Tabel 29 berikut ini.

Tabel 29
Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19
Tahun 2022

AKUN	ALOKASI		%
	ANGGARAN/ DIPA (RP)	REALISASI (RP)	
521131 Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	6.670.000,00	6.667.682,00	99,97
522192 Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	24.398.000,00	24.397.500,00	99,99
524115 Beban Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi COVID-19	219.739.000,00	219.738.341,00	99,99
Total	250.807.000,00	250.803.523,00	99,99

Tidak terdapat beban penanganan pandemi COVID-19 yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19.

D.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp408,00 dan Rp40.111.291,00. Jumlah

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Rp408

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 adalah dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp408,00. Rincian surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 30 berikut ini.

Tabel 30
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	40.111.111,00	(40.111.111,00)	(100,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	408,00	180,00	228,00	126,67
Jumlah	408,00	40.111.291,00	(40.110.883,00)	(99,99)

D.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) pelepasan aset non lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.111.111,00.

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset non Lancar Rp0

D.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.111.111,00. Rincian Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 31 berikut ini.

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	40.111.111,00	(40.111.111,00)	(100,00)
Total	0,00	40.111.111,00	(40.111.111,00)	(100,00)

D.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp408,00 dan Rp180,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 32 berikut ini.

Tabel 32
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI (RP)		NAIK/TURUN	
	2022	2021	JUMLAH	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	408,00	180,00	228,00	126,67
Total	408,00	180,00	228,00	126,67

Jika realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih.

E.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp98.982.006.667,00 dan Rp98.722.218.652,00.

Ekuitas Awal
Rp98.982.006.667,00

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp24.147.708.573,00) dan (Rp24.111.815.817,00).

Surplus/(Defisit) LO
(Rp24.147.708.573,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

E.3 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

Jumlah koreksi nilai set non-Revaluasi Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.972.375,00.

Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi
0,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas Tahun 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp24.094.362.718,00 dan Rp24.402.576.207. Jumlah Transaksi Antar Entitas Tahun 2022 dan 2021, terdiri atas:

Transaksi Antar Entitas
Rp24.094.362.718,00

URAIAN	2022 (RP)	2021 (RP)
Ditagihkan ke Entitas Lain	24.137.319.126,00	24.263.519.395,00
Diterima dari Entitas Lain	(50.756.408,00)	(53.810.851,00)
Transfer Keluar	(0,00)	(0,00)

Transfer Masuk	7.800.000,00	192.867.663,00
Total	24.094.362.718,00	24.402.576.207,00

E.3.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.137.319.126,00 dan 24.263.519.395,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan Tahun 2022.

*Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp24.137.319.126,00*

E.3.2 Diterima dari Entitas Lain

Jumlah diterima dari entitas lain Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp50.756.408,00 dan Rp53.810.851,00. Tidak terdapat Transfer keluar Tahun 2022.

*Diterima dari Entitas Lain
Rp50.756.408,00*

E.3.3 Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.800.000,00 dan Rp192.867.663,00.

*Transfer Masuk
Rp7.800.000,00*

Terdapat Transfer Masuk sebesar Rp7.800.000,00 Tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	VOL	NILAI (RP)
LCD Projector/Infocus	1 Unit	9.750.000,00
<i>Dikurangi :</i>		<i>(1.950.000,00)</i>

<i>Penyusutan LCD Projector/ Infocus</i>	
Total	7.800.000,00

E.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp98.928.660.812,00 dan Rp98.982.006.667,00. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp98.981.403.686,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp52.742.874,00.

Ekuitas Akhir
Rp98.928.660.812,00

F.1 Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Selama Tahun 2022 kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi

*Bantuan Kedinasan
Rp602.107.953,00*

Kalimantan Selatan, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 43 penugasan dan menghasilkan 43 LHP. Adapun realisasi biaya bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp602.107.953,00, dengan rincian sebagai berikut:

BIDANG PENGAWASAN	JUMLAH PENUGASAN	JUMLAH LHP	JUMLAH DANA (RP)
IPP	18	18	199.639.825
APD	4	4	70.881.000
AN	11	11	114.590.000
Investigasi	9	9	196.527.128
P3A	1	1	20.470.000
Jumlah	43	43	602.107.953

Biaya Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi biaya perjalanan dinas/honorarium, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

F.2 Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 30

*Penanganan Pandemi
Rp250.803.523,00*

Desember Tahun 2022 sebesar Rp250.807.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp250.803.523,00 dengan rincian yang tersaji sebagai berikut:

NO	AKUN	ALOKASI		PERSENTASE
		ANGGARAN/DIPA (RP)	REALISASI (RP)	
1.	521131	6.670.000,00	6.667.682,00	99,97
2.	522192	24.398.000,00	24.397.500,00	99,99
3.	524115	219.739.000,00	219.738.341,00	99,99
Total		250.807.000,00	250.803.523,00	99,99